

BAB I

PENDAHULUAN

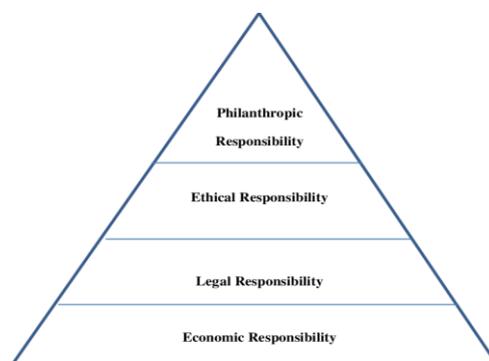
1.1. Latar Belakang

Dalam sebuah bisnis, salah satu upaya untuk menjaga keberlanjutan adalah dengan menerapkan *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan (Elkington, 1997). Implementasi dari tata kelola perusahaan yang konsisten merupakan upaya untuk menjaga hubungan baik bukan hanya dengan *shareholder* tetapi juga *stakeholder*. Hal ini kemudian diimplementasikan dalam sebuah aturan *Good Corporate Governance* (GCG) yang mengatur bagaimana 5 pilar diterapkan, yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness* atau biasa disingkat TARIF (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2011)

Corporate social responsibility (CSR) merupakan salah satu kegiatan yang mendukung terlaksananya aspek *Responsibility* pada GCG. *Corporate social responsibility* (CSR) diartikan sebagai usaha yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam nilai budaya pengambilan keputusan, strategi dan operasi perusahaan (Bisnis & CSR, Reference for Decision Maker dalam Hadi, 2020). *Corporate Social Responsibility* (CSR) termasuk menjadi elemen penting untuk keberjalanan bisnis guna menjaga citra baik perusahaan dimata *stakeholders* khususnya yang terkena dampak dari operasional bisnis pada perusahaan tersebut. Jika CSR berkinerja baik, maka perusahaan akan memiliki *social performance* yang juga baik sehingga *corporate image* juga akan dinilai positif di depan konsumen maupun investor (Prayogo, 2011). Carroll (2009) mendefinisikan inti dari kegiatan CSR terbagi menjadi 4 lapis yang digambarkan dalam *Pyramid of Corporate Social Responsibility*. Dasar dari *pyramid*

berupa tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab filantropis. Keempat elemen tersebut menjadi kesatuan inti dari kegiatan CSR.

Gambar 1.1 Pyramid of Corporate Social Responsibility



Sumber Carroll (2009)

Pelaksanaan CSR oleh perusahaan terbagi dalam 3 tingkatan, antara lain community service, community relation, dan yang paling tinggi adalah community empowerment atau community development (Hadi, 2020). Community service merupakan bentuk CSR dimana perusahaan berusaha memberikan bantuan kepada masyarakat seperti sembako, uang, pembangunan jalan, dan lain sebagainya. Tingkatan kedua adalah cummunity relation, dimana perusahaan berupaya membangun hubungan baik dengan masyarakat setempat. Tingkatan paling tinggi dari pelaksanaan CSR adalah community empowerment atau community development. Perusahaan berusaha membangun kemandirian bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan pelatihan mau pun optimalisasi sumber daya daerah yang dimiliki. Pelaksanaan community empowerment membutuhkan tata kelola yang baik, sinergi dengan masyarakat yang maksimal, dan pendampingan yang seksama.

CSR dalam bentuk *community development* dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti budidaya aquaponik, bank sampah, mau pun pendampingan usaha masyarakat setempat. Pendampingan usaha masyarakat dipilih salah satunya ketika wilayah tersebut memiliki sumber daya manusia yang berpotensi untuk membuat sesuatu yang dapat diperjual-

belikan atau menghasilkan nilai ekonomis. Pendampingan usaha atau bisnis juga sangat diarahkan untuk diberikan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di pedesaan merupakan bentuk dari pengembangan masyarakat (*community development*) yang sangat cocok untuk dikembangkan dengan berbasis kearifan lokal di wilayah pedesaan (Handoko, 2013)

Hal tersebut dikarenakan UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional, dari segi jumlah pelaku, serapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, saat ini terdapat sebanyak 64,1 juta pelaku UMKM atau 99% dari jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia. Sedangkan tenaga kerja yang terserap pada sektor UMKM mencapai 116 juta. Oleh karena itu, penting adanya kolaborasi dari berbagai sektor secara simultan untuk pemberdayaan UMKM agar terus dapat tumbuh pesat. Salah satunya dari sektor bisnis berupa program CSR *community development* dengan bentuk pendampingan UMKM.

Bentuk implementasi pendampingan bisnis oleh perusahaan yang melakukan CSR pada sebuah bisnis kecil atau UMKM, bukan hanya memberikan dukungan berupa uang untuk memfasilitasi keberlangsungan, tetapi juga berbagai pelatihan dan monitoring. Penelitian Seo et al., (2014) dengan judul *Who Benefits Most? The Effects Of Managerial Assistance On High- Versus Low Performing Small Businesses* membahas mengenai hubungan antara bantuan manajerial luar dan kinerja usaha kecil. Penelitian yang menggunakan regresi kuantitatif bersyarat ini menunjukkan hasil bahwa bantuan luar untuk bisnis utama fungsi, seperti strategi pemasaran, strategi promosi, manajemen keuangan dan manajemen umum, lebih efektif untuk perusahaan dengan tingkat kinerja keuangan yang lebih rendah. Bantuan

luar untuk bisnis sekunder, seperti sumber daya manusia dan mendapatkan modal, cenderung memiliki dampak yang lebih besar pada perusahaan di tingkat kuantil menengah ke atas.

Public Disclosure Program for Environmental Compliance atau biasa dikenal dengan PROPER merupakan salah satu instrumen yang memuat penilaian ketaatan perusahaan dengan sebagian dari prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu perusahaan yang berhasil mendapatkan penilaian terbaik kategori emas dalam PROPER adalah PT Pertamina (Persero). Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, dari total 47 perusahaan yang mendapatkan PROPER Emas, 20 diantaranya merupakan perusahaan sub holding dari PT. Pertamina (Persero), antara lain:

- 1) PT. Pertamina (Persero) MOR VI DPPU Sepinggan
- 2) PT. Pertamina (Persero) MOR IV Fuel Terminal Rewulu
- 3) PT. Pertamina (Persero) MOR IV Fuel Terminal Maos
- 4) PT. Pertamina (Persero) MOR V Fuel Terminal Tuban
- 5) PT. Pertamina (Persero) MOR IV Fuel Terminal Boyolali
- 6) PT. Pertamina (Persero) MOR VII DPPU Hasanuddin
- 7) PT. Pertamina (Persero) MOR V Integrated Terminal Surabaya
- 8) PT. Pertamina (Persero) MOR III Fuel Terminal Cikampek
- 9) PT. Pertamina (Persero) MOR III Fuel Terminal Bandung Group
- 10) PT. Pertamina (Persero) MOR IV Integrated Terminal Semarang
- 11) PT. Pertamina Hulu Mahakam Lapangan BSP
- 12) PT. Pertamina EP Asset 3 Field Subang
- 13) PT. Pertamina Hulu Mahakam South Processing Unit (SPU)
- 14) Job Pertamina - Medco E&P Tomori
- 15) PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (Dobu)

- 16) PT. Pertamina EP Asset 5 Field Sangasanga
- 17) PT. Pertamina EP Asset 5 Field Tarakan
- 18) PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang
- 19) PT. Pertamina (Persero) RU II Kilang Sei Pakning
- 20) PT. Pertamina (Persero) RU VII Kilang Kasim Sorong

PT Pertamina (Persero) berkomitmen untuk mempertahankan kinerja untuk memperoleh PROPER Emas dan menjaga upaya agar tidak ada sub holding anak perusahaan yang mendapatkan PROPER merah.

Salah satu sub holding lain dari perusahaan PT Pertamina (Persero) yang memiliki peningkatan dalam penilaian PROPER adalah PT Pertamina Petra Niaga Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Ahmad Yani. PT Pertamina Petra Niaga DPPU Ahmad Yani dalam penilaian PROPER pada tahun 2021 berhasil mendapatkan kategori kandidat emas setelah tahun sebelumnya 2020 mendapatkan penilaian Hijau.

Implementasi CSR pada PT Pertamina DPPU Ahmad Yani adalah dengan *community development*. Usaha kecil Dapur Pertaharjo didirikan CSR PT Pertamina DPPU Ahmad Yani bersama dengan ibu-ibu setempat. Proses pengembangan masyarakat yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi menyangkut pembentukan usaha-usaha lokal yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya ekonomi dan keuangan masyarakat. (Matarrita-Cascante & Brennan, 2012). Pendirian Dapur Pertaharjo merupakan hasil dari social mapping yang sebelumnya sudah dilakukan oleh tim CSR PT Pertamina DPPU Ahmad Yani, dimana dua faktor utama yang mendorong pengembangan usaha adalah karena wilayah Kelurahan Tambakharjo masyarakatnya merupakan kelas ekonomi menengah kebawah dan belum adanya ekosistem kewirausahaan.

Pendampingan bisnis dengan memberikan beberapa pelatihan merupakan salah satu strategi dari CSR PT Pertamina DPPU Ahmad Yani. Banyak strategi yang disampaikan para ahli sosio-ekonomi terkait konsep *community development*. Dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Edi Suharto membagi menjadi 3 strategi, yaitu 1) Aras Mikro, strategi ini berfokus untuk memberdayakan subjek pembangunan yang bersifat individualis. Berbagai program *community development* yang diberikan *stakeholder* dengan menyesuaikan kebutuhan individu; 2) Aras Mezzo, strategi ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, pendidikan, dan dinamika kelompok yang ditujukan terhadap sekelompok kecil masyarakat di lokasi tertentu. Strategi ini diterapkan dengan tujuan agar wawasan, pengetahuan, dan kecerdasan suatu kelompok masyarakat meningkat sehingga keterampilan yang dimiliki semakin optimal. Penerapan strategi aras mezzo juga merupakan upaya agar masyarakat semakin mandiri dalam meningkatkan taraf hidupnya; 3) Aras Makro, merupakan strategi yang cakupannya luas dan komprehensif dikarenakan bertujuan guna mengubah kondisi sosial-ekonomi yang besar (*large system strategy*). Dalam strategi ini, programnya yaitu: aksi sosial, kampanye sosial, membuat kebijakan sosial, hingga perencanaan sosial.

Kegiatan pendampingan bisnis pada usaha Dapur Perrtaharjo dijadikan pilihan dalam implementasi *community development* PT Pertamina DPPU Ahmad Yani melihat kendala yang dirasakan ibu-ibu pengelola Dapur. Kendala tersebut meliputi belum memahami secara betul bagaimana konsep dari membangun sebuah usaha bisnis. Oleh karena itu diperlukan adanya pendampingan yang mampu memberikan dan mengasah *skill* terkait bisnis Dapur dan monitoring serta evaluasi dari keberjalanan bisnis tersebut. Namun selama pendampingan tersebut, terdapat berbagai faktor penghambat dan pendorong tercapainya tujuan.

Salah satu kendala pada proses inkubator bisnis adalah partisipasi yang masih belum optimal dari anggota Dapur Perrtaharjo pada kegiatan pelatihan seperti pada tabel 1.1. Padahal

salah satu elemen dasar dari *community development* adalah adanya partisipasi atas kekuatan dan prakarsa komunitas (Hasim dan Remiswal, 2009). Ketika partisipasi dari kegiatan *community development* belum optimal maka akan muncul beberapa spekulasi terkait faktor penyebab hal tersebut terjadi. Faktor-faktor itulah yang kemudian akan diteliti penulis untuk kemudian menjadi catatan *blue print* dan pembelajaran untuk kegiatan inkubator bisnis apabila dilaksanakan kembali dikemudian hari.

Tabel 1.I.1 Daftar Partisipan Kegiatan Pendampingan Bisnis Dapur Pertaharjo

Nama Kegiatan	Jumlah Peserta yang Hadir	Target Peserta yang Hadir
Pengenalan Tim Inkubator Bisnis Dapur Pertaharjo	15	15
Pengenalan Menu Sehat dan Pelatihan Memasak 1	8	15
Pelatihan Aspek Pemasaran dan Keuangan	6	15
Pelatihan Memasak Menu Sehat 2	7	15
Pelatihan Memasak Menu Sehat 3	7	15
Pengambilan Testimoni untuk Sosial Media Dapur Pertaharjo	3	15
Penutupan dan Evaluasi Kegiatan Pendampingan	15	15

Sumber Olah Data Penulis (2022)

Partisipasi anggota Dapur Pertaharjo jika dilihat dari tabel 1.1, hanya satu kegiatan yang memeneuhi target peserta dari rencana awal kegiatan inkubator bisnis. Keterlibatan peserta dalam proses inkubator bisnis yang tidak sesuai dengan target menjadi salah satu permasalahan utama yang diduga dapat memberikan dampak pada *output* inkubator bisnis. Pada penelitian ini, selain meneliti faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya partisipasi anggota untuk kegiatan inkubator bisnis, penulis juga mencari tau terkait dampak atau output yang diberikan ketika pelaksanaan tersebut tidak optimal dari segi partisipasi.

Dari latar belakang yang dijelaskan, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian evaluasi dari penerapan pendampingan bisnis dalam *community development* yang dilakukan PT Pertamina DPPU Ahmad Yani pada usaha kecil Dapur Pertaharjo. Evaluaso tersebut

mencakup berbagai keberjalanan selama pendampingan, dampak yang dirasakan oleh pengelola Dapur Pertaharjo, khususnya dampak ekonomi dan sosial serta faktor pendukung serta penghambat dari pelaksanaan pendampingan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul "Evaluasi Pendampingan Bisnis melalui *Community development* (Studi Kasus pada Program CSR PT Pertamina DPPU Ahmad Yani terhadap Usaha Kecil Dapur Pertaharjo Semarang).

1.2. Perumusan Masalah

Tujuan dari adanya *community development* adalah mewujudkan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya sekitar agar dapat menjadikan sebuah perputaran roda ekonomi dan kesejahteraan. Salah satu kegiatan yang dapat menunjang terpenuhinya tujuan tersebut yaitu adanya pendampingan bisnis. Melalui pendampingan bisnis, masyarakat mengetahui dan mengerti bagaimana mengelola sumber daya yang dimiliki baik dari segi operasional maupun ekonomi. Program *community development* yang dilakukan PT Pertamina DPPU Ahmad Yani adalah pendampingan bisnis pada usaha Dapur Pertaharjo yang dikelola masyarakat Tambakharjo.

Dalam menjalankan program tersebut, pihak pendamping bisnis sudah merasa optimal dalam pemberian pelatihan maupun dari PT Pertamina dalam pemberian dana serta fasilitas. Namun belum terdapat perkembangan secara terukur yang dapat dilihat dari pendampingan tersebut. Terlebih selama proses pendampingan terdapat beberapa kendala seperti anggota Dapur Pertaharjo yang masih kesulitan dalam membagi waktu antara kegiatan mereka dengan kegiatan pelatihan Dapur Pertaharjo sehingga partisipasi dalam kegiatan inkubator bisnis belum optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mencari bukti dugaan-dugaan tersebut. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini akan memfokuskan pada proses pendampingan bisnis melalui *community development* Dapur Pertaharjo dan dampaknya pada kondisi sosial

dan ekonomi. Pada penelitian ini akan dieksplorasi proses inkubator bisnis pada Dapur Pertaharjo. Berdasarkan uraian identifikasi permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pendampingan bisnis CSR PT Pertamina DPPU Ahmad Yani kepada Usaha Dapur Pertaharjo Kelurahan Tambakharjo Kota Semarang?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan pendampingan bisnis CSR PT Pertamina DPPU Ahmad Yani kepada Usaha Dapur Pertaharjo Kelurahan Tambakharjo Kota Semarang?
3. Bagaimana dampak ekonomi dan *society* pelaksanaan pendampingan bisnis CSR PT Pertamina DPPU Ahmad Yani bagi Usaha Dapur Pertaharjo Kelurahan Tambakharjo Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasar pada masalah yang telah diidentifikasi, maka penelitian yang dilaksanakan memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pendampingan bisnis CSR PT Pertamina DPPU Ahmad Yani kepada Usaha Dapur Pertaharjo Kelurahan Tambakharjo Kota Semarang
2. Mengetahui faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pendampingan bisnis dalam *community development* PT Pertamina DPPU Ahmad Yani Kelurahan Tambakharjo Kota Semarang
3. Mengetahui dampak ekonomi dan *society* pelaksanaan pendampingan bisnis CSR PT Pertamina DPPU Ahmad Yani bagi Usaha Dapur Pertaharjo Kelurahan Tambakharjo Kota Semarang

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasar tujuan yang telah dipaparkan, maka kegunaan dari penelitian ini dapat dirasakan oleh 3 pihak, yaitu

1.4.1 Bagi PT Pertamina DPPU Ahmad Yani

Penelitian ini berguna dalam menyusun strategi kedepan terkait bagaimana pelaksanaan *community development* agar dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan tersebut dan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan *community development*.

1.4.2 Bagi Pelaku Pendampingan Bisnis

Penelitian ini berguna sebagai bekal untuk mengetahui bagaimana langkah, upaya, dan pendekatan yang tepat dalam melakukan sebuah pendampingan bisnis agar menghasilkan dampak yang positif.

1.4.3 Bagi Pihak Lain

Penelitian ini berguna sebagai bahan referensi apabila melakukan penelitian terkait topik yang sama seperti pendampingan bisnis, *community development*, maupun *corporate social responsibility*

1.5. Kerangka Teori

1.5.1 Corporate Social Responsibility

Konsep dari CSR pada dasarnya menegaskan bahwa sebuah organisasi perusahaan tidak hanya mementingkan urusan mereka sendiri (*selfish*) yang membuat mereka jauh dari masyarakat, tetapi wajib beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Konsep ini memberikan alternatif untuk perusahaan guna menyertakan lingkungan sosial dan lebih memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan perusahaan tersebut terhadap lingkungan sekitar.

Dalam perkembangannya, CSR kemudian diartikan sebagai komitmen organisasi atau perusahaan guna mengambil tindakan etis secara berkelanjutan, menjalankan operasinya secara

legal, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang juga disertai dengan upaya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya sekaligus juga meningkatkan kualitas masyarakat secara lebih luas. CSR memiliki definisi yang disampaikan oleh para ahli. CSR didefinisikan oleh *World Business Council For Sustainable Development (WBCSD)* sebagai “*corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave ethical and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of local community and society at large*” yang artinya “tanggung jawab sosial adalah komitmen berkelanjutan pada kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki kualitas hidup angkatan kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan”(Hadi, 2020)

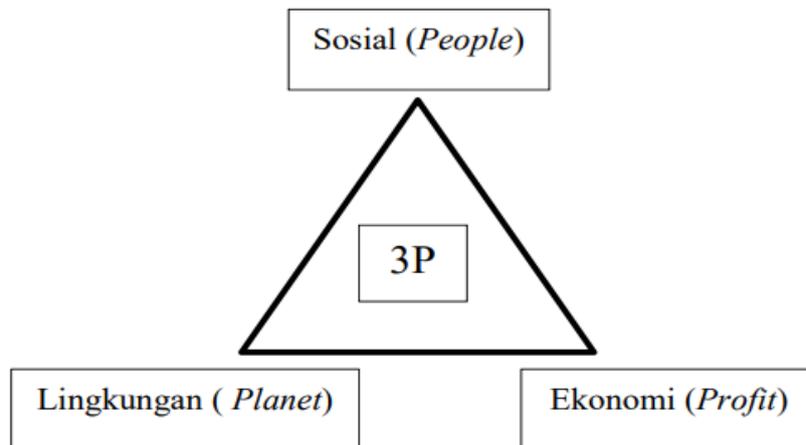
Dalam ISO 26000 dikutip oleh Rusdianto dalam bukunya *CSR Communications A Framework For PR Practitioners*, CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder* sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, serta terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi .

Konsep Dasar CSR

Dengan semakin berkembangnya konsep CSR, maka banyak teori yang berkembang dan diungkapkan berbagai pihak mengenai CSR. Satu teori yang terkenal adalah konsep teori “*Triple Bottom Line*” yang dikemukakan oleh Elkington (1997) yang dimuat dalam buku “*Canibals with forks, the triple bottom of Twentieth Century Business*”. Konsep tersebut mengakui bahwa jika perusahaan ingin sustain maka perlu memperhatikan 3P, yaitu tidak

hanya profit yang dicari, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Gambar 1.3 Konsep *Triple Bottom Line* (Elkington 1998 dalam Wibisono 2007)



Sumber Hadi, (2011)

Konsep ini menggambarkan bahwa kepedulian masyarakat, terjaganya kondisi lingkungan, dan usaha agar perusahaan memperoleh profit dilaksanakan secara integral. Profit adalah salah satu tujuan yang harus dipenuhi perusahaan agar operasinya berjalan lancar dan usahanya semakin berkembang. *People* adalah lingkungan masyarakat (*community*) tempat perusahaan menjalankan operasinya. *People* diartikan sebagai pihak yang memberikan dan menerima pengaruh perusahaan. Oleh sebab itu, *community* mempunyai hubungan kuat demi terciptanya nilai bagi perusahaan. Jika masyarakat sekitar tidak mendukung, maka sangat sulit bagi perusahaan untuk terus beroperasi.

Melalui implementasi *Triple Bottom Line*, fokus perusahaan tidak hanya pada aspek peningkatan profit saja, tetapi juga mencakup aspek sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*). Dalam menjalankan praktik bisnisnya, keuntungan ekonomi dan keuntungan sosial harus mampu dipadukan oleh perusahaan. Secara ekonomis, perusahaan berupaya mendapatkan profit sebab hal tersebut merupakan salah satu tujuan mendasar perusahaan. Sedangkan secara

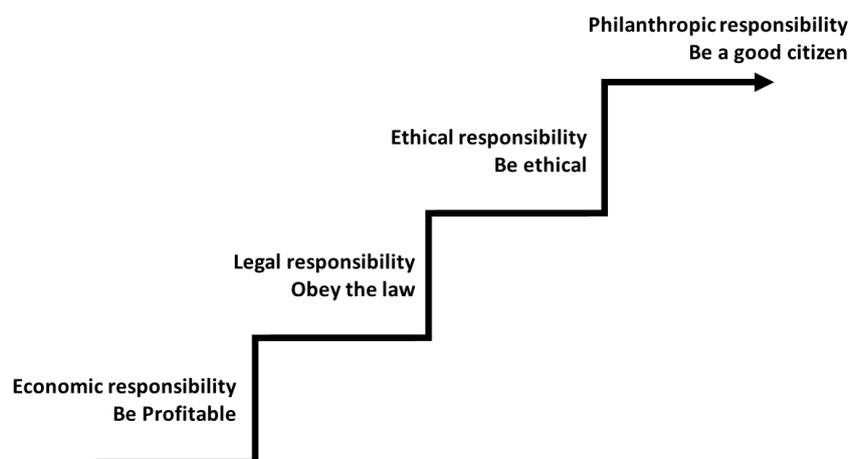
sosial, terdapat dampak sosial dari perusahaan yang mampu memberikan keuntungan untuk masyarakat sehingga perusahaan akan dilegitimasi secara sosial oleh masyarakat.

Bentuk dan Tingkatan Corporate Social Responsibility

Terdapat tiga CSR yang meliputi (1) *community service* dimana perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan bantuan sembako, penyediaan sarana dan prasarana air bersih, jalan, jembatan, penerangan dan sebagainya. Dalam format PROPER, *community service* ini masuk dalam kategori *charity dan infrastructure*. (2) *Community relation* adalah upaya perusahaan membina hubungan baik dengan masyarakat melalui berbagai cara misalnya membentuk unit khusus untuk menerima pengaduan (*complaint*). (3) *community empowerment* adalah upaya perusahaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat melalui berbagai kegiatan misalnya budidaya lele, rumput laut, mangrove, sampah, yang sesuai dengan potensi SDA dan SDM setempat. *Community empowerment* atau *community development* merupakan bentuk CSR yang paling tinggi dan rumit yang memerlukan perencanaan, tata kelola dan pendampingan yang seksama

Dalam pandangan Krisdyatmoko (2017), bentuk-bentuk CSR yang dilaksanakan perusahaan dikelompokkan dalam kategori berikut

Gambar 1.4 Variasi Implementasi CSR



Sumber Krisdyatmiko (2017) dalam (Hadi, 2020)

Pada tingkatan yang paling rendah, perusahaan hanya berorientasi semata-mata mencari profit. Perusahaan merasa hanya bertanggung jawab kepada *shareholders* atau pemiliknya saja tanpa memperhatikan kepentingan yang lebih luas termasuk masyarakat. Tingkatan yang kedua disebut sekedar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa mempedulikan apakah CSR yang dilaksanakan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau tidak. Dalam konteks ini bentuk CSR kemungkinan hanya pada tingkatan *community service* atau *charity*. Tingkatan yang ketiga adalah memenuhi tanggung jawab etika atau sebagai balas budi atas kebaikan masyarakat yang tidak menolak kehadiran perusahaan. Sedangkan tingkatan yang paling tinggi disebut sebagai tanggung jawab *philanthropic* untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

Dari segi pengertian, pemberdayaan masyarakat atau *community development (comdev)* merupakan strategi guna membantu masyarakat mengenali permasalahan dan menemukan sendiri solusinya. Karena itu pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah paradigma pembangunan dimana keterlibatan masyarakat merupakan sebuah keharusan dan harus dilakukan pada tahapan awal perencanaan. *Comdev* bukanlah pembangunan konvensional dimana perencanaannya datang dari atas baik dari Pemerintah atau perusahaan

1.5.2 *Community Development*

CSR yang paling banyak diterapkan adalah *Community Development (CD)*, meski kedua hal tersebut berbeda. *Community development* dapat dipahami sebagai strategi agar masyarakat dapat mengenali permasalahan dan memecahkan permasalahan tersebut (Hadi, 2020). *Community development* memungkinkan pihak yang memberikan dan menerima pelayanan ikut serta dalam proses merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi. *Community development* mencakup beragam pelayanan sosial yang berkaitan dengan masyarakat, mulai

dari pelayanan preventif bagi anak-anak hingga pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah.

Dalam program pemberdayaan masyarakat, salah satu aspek pentingnya adalah penyusunan program dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengoptimalkan partisipasi kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, bersumber dan sensitif terhadap sumber daya dan nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menimbulkan ketergantungan, melibatkan banyak pihak, serta berkelanjutan. *Community development* merupakan kegiatan untuk mengembangkan masyarakat yang ditujukan guna memperluas akses masyarakat dalam rangka meningkatkan kondisi sosial-ekonomi-budaya melalui berbagai program yang membuat masyarakat tersebut menjadi lebih mandiri.

1.5.2.1 Tujuan *Community Development*

Tjetjep (2005) mengungkapkan bahwa industri di sektor energi dan sumber daya mineral/pertambangan melakukan *community development* melalui pembangunan yang cukup bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Pada umumnya, industri energi dan sumber daya mineral di Indonesia maupun di seluruh dunia cenderung berada di tengah-tengah masyarakat tradisional yang memiliki perbedaan cukup signifikan dengan masyarakat industri baik dalam aspek aspek sosial.

Menurut Hadi dan Adji (2007), ketika sumber daya mineral dieksploitasi, maka perusahaan yang bersangkutan berkewajiban untuk menciptakan kondisi awal yang mampu membuat masyarakat dapat terus melakukan pembangunan setelah eksploitasi yang dilakukan selesai. Proses ini dikenal dengan transformasi sosial melalui pengembangan masyarakat (*community development*) melalui penyiapan kemampuan masyarakat sekitar yang ditujukan untuk periode waktu setelah perusahaan menyelesaikan operasinya.

Hadi (2019) menyatakan bahwa *community development* bertujuan agar kemampuan masyarakat tertentu semakin meningkat sehingga permasalahan yang muncul dalam masyarakat tersebut dapat mereka selesaikan secara mandiri. Selain itu, tujuan lain dari *community development* antara lain:

- a. Melakukan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena penggusuran dari kegiatan proyek.
- b. Merealisasikan keadilan distributif
- c. Mengoptimalkan peran aktif dari masyarakat

Community development juga bertujuan guna mengentaskan kemiskinan, merealisasikan keadilan distributif, dan meningkatkan peran aktif dari masyarakat. Program *community development* diterapkan agar pendapatan masyarakat khususnya masyarakat miskin/tertinggal semakin meningkat. *Community development* bersifat fungsional, yaitu mendukung masyarakat agar menjadi lebih mandiri.

Community development yang dilaksanakan oleh sektor energi dan sumber daya mineral dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan antara lain:

1. Untuk menyiapkan *life after mining/operation* (pasca operasi) bagi daerah maupun masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.
2. Program *community development* yang dilaksanakan merupakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*).

Program *community development* yang dilaksanakan memiliki tujuan agar masyarakat semakin sejahtera dan mandiri serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik dengan tetap berupaya melestarikan lingkungan sekitar. Program *community development* harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan program tersebut diselenggarakan. Jika tidak demikian, maka masyarakat akan cenderung menggantungkan dirinya terhadap kehidupan industri karena

program yang dilaksanakan tidak mampu mengakomodasi potensi masyarakat. Hal tersebut membuat masyarakat tidak mandiri karena terbiasa menunggu program yang diberikan oleh industri tersebut.

Pada tingkat mikro (komunitas dan korporat), berbagai program *community development* banyak memberi manfaat yang bersifat tidak langsung dalam mendukung berbagai program pembangunan berkelanjutan pada tingkat makro. Adapun manfaat yang dimaksud yaitu: meminimalkan tingkat risiko, membentuk citra perusahaan, mengembangkan modal sosial (kualitas sumber daya manusia), meminimalkan biaya (dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia), meningkatkan keuntungan/pendapatan, dan mengoptimalkan akses ke pasar.

1.5.2.2 Fasilitator *Community Development*

Community development yang sukses terjadi karena adanya peran penting dari fasilitator. Dalam program *community development*, terdapat beberapa fasilitator, antara lain (Hadi, 2001):

1. Pemimpin masyarakat lokal

Pemimpin kategori ini merupakan seseorang yang dipilih masyarakat atau memilih dirinya untuk memimpin program *community development* yang dilaksanakan, dan masyarakat memercayai kemampuan yang dimilikinya serta menganggap orang tersebut dapat melaksanakan program terkait. Posisi ini bersifat sukarela sehingga tidak menerima bayaran. Pemimpin kategori ini dapat berasal dari masyarakat asli sampai dengan individu yang telah mengikuti pelatihan tertentu. Namun, terkadang ada beberapa program *community development* yang hanya memperoleh sedikit bantuan dari pihak eksternal. Masyarakat lokal perlu mendukung program yang dijalankan sebab hal tersebut merupakan tanggapan bahwa mereka mengakui dan bersedia guna menjalankan program pemberdayaan terkait.

2. Penduduk lokal yang memiliki keahlian

Pemimpin kategori ini menguasai keahlian untuk menjalankan program *community development* seperti upaya untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pertanian, dan lain sebagainya. Secara umum pemimpin kategori ini harus membentuk panitia yang terdiri atas masyarakat setempat. Panitia tersebut memiliki tanggung jawab dalam pengaturan keuangan dan pengawasan terhadap program *community development* yang dilaksanakan. Program *community development* akan berhasil jika pemimpin memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengelola serta panitianya mampu melaksanakan program yang telah direncanakan sebelumnya.

3. Profesional dari Luar

Fasilitator kategori ini umumnya merupakan seorang profesional yang diberi tugas oleh pemerintah guna melaksanakan program *community development*. Namun, kesejahteraan yang dibawa oleh fasilitator sifatnya sementara, dikarenakan ia melakukannya atas dasar tuntutan sponsor atau pemberi tugas, bukan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

4. Pekerja *Community Development* Serba Bisa

Fasilitator yang diundang atau dikirim ke masyarakat lokal guna menunjang penyelesaian program *community development*. Fasilitator ini umumnya memiliki ketertarikan guna menyejahterakan masyarakat setempat. Kegiatan yang diberikan biasanya ditujukan kepada pemimpin lokal agar para pemimpin tersebut mampu menjalankan program yang dicanangkan secara mandiri setelah fasilitator tidak ada. Pekerja *Community Development* biasa disebut *Community Development Officer (CDO)*

1.5.2 Pendampingan Bisnis

Dalam beragam program pengembangan masyarakat, fasilitator atau pendamping bertugas untuk memberikan pendampingan. Fasilitator kerap dikenal pula sebagai fasilitator

masyarakat (*community facilitator/CF*) dikarenakan tugasnya yang cenderung mendorong, menggerakkan, menjembatani, dan memotivasi masyarakat. Sedangkan program tersebut dilaksanakan dan dikelola masyarakat setempat. Konsep pendampingan yang diinginkan adalah kegiatan pendewasaan yang didasari dengan niat untuk memberikan bimbingan melakukan pengembangan yang dikomunikasikan antara fasilitator dan masyarakat.

Dalam pendampingan masyarakat, terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasannya, antara lain (Karsidi, 2007)

1. Belajar Dari Masyarakat

Dalam pendampingan masyarakat, prinsip fundamental yang menjadi landasannya adalah kegiatan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dengan demikian, pendampingan dilaksanakan dengan keyakinan bahwa masyarakat mampu menyelesaikan permasalahannya dengan memanfaatkan nilai dan ilmu pengetahuan tradisional.

2. Pendamping sebagai Fasilitator, Masyarakat sebagai Pelaku

Prinsip pertama memiliki konsekuensi berupa tuntutan terhadap pendamping bahwa ia harus mendampingi bukan menggurui. Maka dari itu, pendamping perlu bersikap rendah hati dan mau belajar kepada masyarakat serta mencoba memahami masyarakat dengan menjadikan mereka sebagai narasumber utama. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk lebih dominan dalam melaksanakan program. Kalaupun pendamping berperan lebih besar di awal, maka seiring waktu perannya harus dikurangi melalui pengalihan prakarsa kegiatan-kegiatan kepada masyarakat terkait.

3. Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman

Pendampingan memerlukan pengakuan terhadap pengetahuan dan pengalaman masyarakat. Hal tersebut tidak berarti masyarakat selalu benar. Realitas yang terjadi adalah terkadang permasalahan yang muncul dan berkembang dalam dunia modern

tidak dapat dikejar oleh pengetahuan dan pengalaman masyarakat. Meskipun demikian, hal serupa juga terjadi terhadap pengetahuan dan pengalaman modern sehingga pengetahuan dan pengalaman tersebut tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat.

Pendampingan merupakan interaksi antara pendamping dengan kelompok atau masyarakat penerima manfaat yang dilaksanakan secara intens dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat. Maka dari itu, pendamping harus memahami peran dan tugasnya guna memotivasi masyarakat agar lebih mandiri, mampu mendorong masyarakat supaya lebih inovatif dalam pemberdayaan, dan mampu memediasi serta memfasilitasi masyarakat menjadi lebih berkembang.

Unsur pendampingan desa meliputi;

1. Pendamping profesional terdiri atas; tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di pusat dan provinsi, berkedudukan di kabupaten/kota, dan berkedudukan di kecamatan, serta tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa.
2. Kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) berasal dari; Warga desa setempat, Dipilih melalui musyawarah desa, dan Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Pendamping pihak ketiga meliputi; LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan – lainnya.

1.5.3 Evaluasi *Community Development*

1.5.3.1 Evaluasi Program

Secara konseptual Dale (2004) mengartikan evaluasi sebagai upaya guna memberikan penilaian terhadap seluruh hasil program pengembangan. Evaluasi dapat diartikan sebagai upaya menilai program pengembangan secara menyeluruh. Evaluasi terhadap capaian atau hasil program dapat dilaksanakan pada pertengahan atau akhir program. Evaluasi bertujuan utama guna mendapatkan kepastian terkait program yang dilaksanakan, apakah program

tersebut terselenggara sesuai dengan yang direncanakan dan apakah tujuan program tersebut dapat tercapai atau tidak. Oleh sebab itu, evaluasi berfokus variabel utama berupa tujuan program yang diukur berdasarkan indikator program tersebut.

Evaluasi program merupakan kegiatan yang bertujuan guna menilai capaian kerja dan cara agar program berikutnya menjadi lebih baik. Dalam melakukan evaluasi, terdapat tiga metode yang dipergunakan, yaitu: pertama, merumuskan desain evaluasi yang mencakup penetapan variabel, indikator, dan ukuran serta metode untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Kedua, melaksanakan penelitian lapangan yang didahului dengan penyusunan rencana kerja, penetapan sampel, informan, objek observasi dan data sekunder. Ketiga, melakukan pengolahan, penyeleksian, dan pengelompokan data, baik data kualitatif maupun data kuantitatif.

1.5.3.2. Bentuk Evaluasi

Bentuk evaluasi menurut Dale (2004) dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu *formative evaluation*, *summative evaluation*, dan *empowerment evaluation*.

- a. Evaluasi formatif (*formative evaluasi*) merupakan evaluasi agar program yang diselenggarakan memiliki kinerja yang lebih baik, umumnya dilaksanakan ketika program masih berlangsung atau di tengah-tengah program. Evaluasi bentuk ini bertujuan guna memastikan bahwa program dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan dijadwalkan sehingga tujuan dapat tercapai tepat waktu.
- b. Evaluasi sumatif (*summative evaluation*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan ketika program sudah berakhir guna memastikan apakah program tersebut berhasil atau tidak. Evaluasi seperti ini perlu dilaksanakan untuk mengetahui apakah program yang sama jika dilaksanakan di tempat lain dengan kondisi yang cenderung akan memperoleh hasil yang

sama. Maka dari itu, penilaian dalam evaluasi sumatif dilaksanakan secara menyeluruh terhadap elemen perencanaan dan variabel tujuan yang diinginkan.

- c. Evaluasi pemberdayaan (*empowerment evaluation*). Evaluasi ini bertujuan guna mengetahui seberapa berhasil program yang dilaksanakan berdasarkan ukuran “pemberdayaan” seperti *capacity building*, pengelolaan organisasi, pengoptimalan kesadaran pemanfaat serta aspek lain terkait dengan konsep pemberdayaan. Apabila tujuan program yang dicapai seperti itu, maka evaluasi yang diperlukan harus memiliki bentuk yang berbeda dengan evaluasi lainnya, yaitu menilai seberapa besar “tingkat kemandirian” penerima apabila program sepenuhnya dilakukan oleh mereka.

Bentuk evaluasi yang berbeda juga dipengaruhi oleh pendekatan program yang dipergunakan baik itu CSR maupun CD. Perbedaan tersebut umumnya ditentukan oleh program yang dilaksanakan, perspektif yang dipergunakan, kepentingan program program, dan tujuan yang diinginkan. Keberhasilan program juga dapat dinilai secara berbeda apabila perspektif yang dipergunakan berbeda. Misalnya keberhasilan program akan dinilai secara berbeda dari perspektif *locality development*, perspektif *social action*, dan perspektif *social planning*. Misalnya, berdasarkan perspektif *locality development*, tujuan program adalah membangun melalui peningkatan kemandirian, maka keberhasilan program diukur melalui ukuran “kemandirian” masyarakat terhadap bantuan dan intervensi dari pihak eksternal. Sedangkan berdasarkan perspektif *social action*, CSR dan CD memiliki tujuan guna merangsang terjadinya perubahan sosial, menaikkan posisi tawar masyarakat terhadap institusi lain sehingga keberhasilan akan diukur melalui tingkat “pemberdayaan” yang dicapai oleh masyarakat terkait. Dengan demikian, maka bentuk evaluasi yang sering digunakan adalah *capacity building* untuk mengamati bagaimana membangun masyarakat atau gerakan sosial secara mandiri.

Menurut perspektif *social planning*, program memiliki tujuan utama berupa penyelesaian permasalahan tertentu dalam masyarakat, seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, keberhasilan program dinilai dari aspek penyelesaian permasalahan, sehingga evaluasi yang dapat diterapkan evaluasi formatif dan sumatif. Program CSR dan CD cenderung merujuk terhadap *social planning*, sehingga evaluasi yang dilaksanakan adalah evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif bertujuan guna memberikan penilaian apakah hasil program sesuai dengan rencana, sedangkan sumatif dipergunakan guna mengidentifikasi bahwa program tersebut dapat dijalankan di tempat lain.

1.5.3.3 Etika Evaluasi

Dalam melaksanakan evaluasi, terdapat beberapa prinsip, yaitu objektivitas (berdasar kenyataan) dan netralitas (tidak berpihak). Objektivitas dan netralitas dapat dicapai apabila evaluator memiliki integritas.

Dalam konteks evaluasi terhadap program CSR dan CD, saat ini lembaga yang dapat dipercaya dan diandalkan serta diterima oleh semua pihak (legitimasi tinggi) masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, pada umumnya diperlukan evaluator yang beintegritas untuk melaksanakan evaluasi terhadap program CSR dan CD agar hasil evaluasi tetap valid dan reliabel. Di samping etika, pendekatan kerja juga menjadi penentu seberapa reliabel hasil evaluasi yang dilaksanakan. Secara substansial, evaluasi adalah upaya untuk menilai kinerja program pemberdayaan (CSR dan CD). Evaluasi dapat dilaksanakan secara kualitatif maupun kuantitatif. Akan tetapi dalam penyajian evaluasi capaian atau hasil berupa “tinggi-rendah” atau “baik-buruk” akan lebih baik jika dilaksanakan melalui ukuran kuantitatif karena lebih mudah dipahami, diterima, dan dipercaya. Dalam penyajian ini, skala yang digunakan tidak harus skala rasio, tetapi juga dapat skala interval atau bahkan nominal selama masih dapat didefinisikan. Berdasar pada hal tersebut, maka evaluasi merekomendasikan penggunaan

pendekatan kuantitatif guna menunjukkan capaian atau hasil program. Meskipun demikian, pendekatan kualitatif juga masih tetap dapat dipergunakan (Patton, 1990).

Sebuah penilaian perlu dijelaskan secara kualitatif agar dapat dideskripsikan sehingga lebih mudah dipahami. Selain itu, penjelasan kualitatif dapat dipergunakan guna menjabarkan hasil penilaian dari objek yang tidak berwujud seperti tingkat "kepuasan", "persetujuan" atau "integrasi sosial". Akan tetapi, tidak semua substansi yang dievaluasi memiliki skala rasio sehingga perlu dilakukan konversi ke dalam penilaian yang dapat dibaca perbedaan antara satu tingkat dengan lainnya. Berdasar pada pemaparan yang telah disampaikan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah penilaian CSR dan CD dilakukan melalui pendekatan kuantitatif, tetapi agar penilaian yang didapatkan lebih mudah dipahami, hasil penilaian tersebut perlu dijelaskan secara kualitatif. Dengan demikian, maka kedua pendekatan ini dapat dipergunakan secara bersamaan agar diperoleh hasil yang lebih jelas dan mendalam.

1.5.3.4 Langkah Kerja Evaluasi

Prinsip dari metode kerja evaluasi program CSR dan CD secara umum sama dengan metode kerja riset terapan (Wartick, 2002). Hasil evaluasi yang diperoleh berkorelasi erat dengan seberapa tepat metode dan bagaimana prosedur atau langkah kerja yang dipilih dalam menjalankan evaluasi. Jika metode ditetapkan dengan benar, maka pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data akan menjadi lebih akurat karena dilaksanakan secara tepat sebagaimana dalam bidang akademik (CSRSM, 2007). Maka dari itu, penjelasan metode kerja yang dipergunakan penting untuk disampaikan dalam penyajian laporan evaluasi. Pilihan dan ketepatan metode kerja dalam evaluasi program akan memastikan "*appropriateness*" atau "*fit for purpose*" atas keseluruhan hasil evaluasi (Denscombe, 2003).

Sebelum memperoleh kerangka untuk menilai kinerja program, kerangka evaluasi harus dirumuskan lebih dulu dengan mempergunakan pendekatan deduktif. Maka dari itu, batasan

variabel atau konsep yang akan diukur perlu ditentukan secara jelas. Konsep sebagai komponen program yang dijalankan harus dikembangkan kemudian dibagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Apabila penetapan indikator sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah menetapkan ukuran “tinggi-rendah” atau “baik-buruk” atau “berhasil-gagal.” Meski bergantung pada substansi yang akan diukur, nilai capaian dapat diubah menjadi angka sehingga nantinya dapat dilihat perbedaan antara ukuran yang satu dengan lainnya. Pengukuran (measuring) tidak harus selalu berbentuk kuantitatif tetapi juga dapat berbentuk kualitatif sebagaimana yang disampaikan Gauthier (2005) dalam Prayogo (2011).

Meskipun demikian, penilaian kualitatif lebih baik diubah menjadi satuan numerikal supaya perbedaan ukuran yang dinilai akan lebih mudah diamati. Maka dari itu, pembuatan definisi dari masing-masing indikator yang akan dipergunakan perlu dilakukan supaya ukuran yang dinilai dapat ditentukan. Apabila pendekatan dan pengukuran telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menjabarkan langkah kerja evaluasi. Langkah kerja evaluasi adalah prosedur kerja yang juga memengaruhi seberapa valid evaluasi yang dilaksanakan. Metode evaluasi perlu dijelaskan agar lebih mudah dipahami dan diketahui bahwa prosedur evaluasi sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah.

Sama dengan penelitian pada umumnya, secara fundamental langkah kerja evaluasi dapat dibagi menjadi empat tahap, yaitu: pertama, merumuskan desain evaluasi; kedua, pengumpulan data atau penilaian lapangan; ketiga, analisis dan penyajian data, dan melakukan penilaian data; keempat, menyusun laporan dan menyampaikan saran dan rekomendasi guna perbaikan program selanjutnya. Tahap kerja ini secara keseluruhan merupakan proses yang berkelanjutan, sehingga seluruh tahap harus baik agar seluruhnya juga menjadi baik. Dengan pendekatan deduktif, maka tahap perumusan desain evaluasi menjadi penentu dari tahap

berikutnya. Hal tersebut berarti bahwa substansi yang akan dievaluasi dan kualitas data yang akan didapatkan sangat bergantung pada seberapa baik desain evaluasi yang disusun.

1.5.4 *Compas Sustainability*

Compass Sustainability atau kompas keberlanjutan merupakan metode dalam pengelolaan indikator dan penilaian *stakeholder*. Kompas berisi arah *North* (Utara), *East* (Timur), *South* (Selatan), *West* (Barat) yang direpresentasikan sebagai *Nature* (Alam), *Economy* (Ekonomi), *Society* (Masyarakat), dan *Wellbeing* (Kesejahteraan). Kompas keberlanjutan dikembangkan oleh Alan AtKisson telah dipergunakan di seluruh dunia. Kompas ini dipergunakan perusahaan guna memadukan dan mengomunikasikan sistem pengelolaan keberlanjutan dan penilaian kemajuan perusahaan. Kompas ini merupakan hasil kombinasi dari alat komunikasi yang sederhana dan efektif dengan pendekatan yang lebih baru terhadap ilmu pengukuran keberlanjutan, sehingga dapat menemukan metode guna mencapai tujuan keberlanjutan dan mempermudah pengambilan keputusan

1.5.5.1 *Nature* (Alam)

Alam merujuk kepada sumber daya alam dan sistem ekologi, yang meliputi keanekaragaman hayati, habitat dan kesehatan ekosistem, kualitas lingkungan dan polusi, pengelolaan sumber daya alam, estetika, kesadaran alam, apresiasi dan keaksaraan ekologis. Jika menggunakan bahan yang terbuat dari plastik, tentu harus mempertimbangkan apakah bahan tersebut baik untuk keberlanjutan alam dan akan merusak alam atau tidak dan hal ini harus dipertimbangkan oleh *stakeholder*. Indikator terkait nature (alam) adalah alam lingkungan, sumber daya, ekosistem, dan iklim (AtKisson., 1997)

1.5.5.2 *Economy* (Ekonomi)

Ekonomi merupakan proses ketika sumber daya dimanfaatkan guna memperoleh hasil berupa barang dan jasa sesuai kebutuhan manusia. Kompas ini mempunyai dimensi yang

meliputi berbagai hal seperti upah, pekerjaan, produksi, distribusi, konsumsi, pasar, energi, penelitian dan pengembangan, pendapatan dan utang, serta investasi. Ekonomi juga mendukung adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar mampu mendukung ekonomi negara sehingga masyarakat lebih sejahtera. Indikator pada *economy* (Ekonomi) yaitu produksi, konsumsi, pekerjaan, Investasi dan uang (Atkisson, 2009)

1.5.5.3 *Society* (Masyarakat)

Masyarakat merupakan dimensi kolektif dan institusional peradaban manusia, yang berisi penggabungan segala sesuatu mulai dari pendidikan, pemerintahan, norma sosial mengenai keadilan, dan lain sebagainya. Kebudayaan, pelayanan publik, infrastruktur, kebijakan publik, hukum, tata kelola, hubungan antara kelompok, dan lain-lain juga termasuk dalam dimensi ini (Atkisson, 2009)

1.5.5.4 *Well-being* (Kesejahteraan)

Kesejahteraan merujuk kepada rasa bahagia dan puas orang-orang, kesehatan fisik dan psikis, hubungan personal, dan peluang guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Indikator kesejahteraan dalam sustainability compass yaitu kesejahteraan individu, kesehatan keluarga, pengembangan diri dan kualitas hidup (Atkisson, 2009)

1.5.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan landasan dalam penyusunan tesis dan bahan referensi dalam menemukan *research gap* sehingga penelitian ini dapat berguna sebagai pelengkap sebuah ilmu pengetahuan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa dan menjadi acuan penulis dalam menyusun penelitian ini sebagaimana diuraikan dalam tabel 1.3 berikut

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Pertanyaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ridwanullah, Ade Iwan (2009) Tesis UGM Magister Studi Kebijakan UGM Tesis	Implementasi <i>Community Development</i> di PT Pertamina UP VI Balongan Indramayu	Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi <i>community development</i> .	Faktor yang mempengaruhi implementasi terdiri dari (1) sumber daya manusia (2) komunikasi (3) struktur organisasi
2.	Prihatini, Chatarina Endah, Kuskridho Ambardi (2010) Tesis UGM Magister Komunikasi UGM Tesis	Implementasi Konsep <i>Community Development</i> dalam Program CSR: Studi Kasus Program Corporate Citizenship Mobil Cepu Limited (MCL) pada Masa Eksplorasi Minyak di Lapangan Banyuurip tahun 2009	Bagaimana memaknai pelaksanaan CSR atau <i>community development</i> ;	Bagaimana CDO MCL mengimplementasikan kegiatan dalam berbagai situasi menghadapi hambatan dan tantangan demi tercapainya tujuan program.
4.	Eko Widodo (2019) Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan UIN SUKA Vol. 3, no. 1 Jurnal	Mengukur Kepuasan Masyarakat Pada Program CSR di Desa Kertajaya Sebuah Analisis Menggunakan Metode <i>Sustainability Compass</i>	Bagaimana keberjalanan program CSR yang sudah berjalan di Desa Kertajaya.	Program CSR yang berjalan dinilai positif oleh masyarakat dengan skor akhir Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu 3.48 dan terdapat dua kelompok yang perlu ditingkatkan program, yaitu kelompok Turban dan Masebajaya

No	Peneliti	Judul	Pertanyaan Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Zakky (2020) Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 3. No.1 Jurnal	Proses <i>Community Development</i> Pada Program Bank Sampah Di Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Binaan PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Cikampek	Bagaimana proses <i>community development</i> pada program bank sampah di Desa Dawuan Barat binaan PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Cikampek	Deskriptif program sesuai dengan Tujuh tahapan proses <i>community development</i> yaitu Enggamenet (Persiapan), Assessment, Perencanaan Alternatif Program, Pemformulasian Rencana Aksi, Implementasi program, Evaluasi dan Hasil Perubahan dan Terminasi
5.	Feti Fatimatuzzahroh (2021) Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Disertasi	Model <i>Community Development</i> Rehabilitasi Dan Ekowisata Mangrove (Studi Kasus Pesisir Karangsong, Kecamatan Indramayu, Provinsi Jawa Barat)	Bagaimana penerapan dan model <i>community development</i> dalam rehabilitasi mangrove di Karangsong termasuk dampak lingkungan, ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dan peran dari berbagai stakeholder	Tipologi <i>community development</i> pada kegiatan rehabilitasi mangrove di Karangsong termasuk dalam kategori self-help dan perkembangan menjadi ekowisata, tipologi <i>community development</i> berada pada tahap <i>directed</i>
6.	Windi Dwi Pratiwi, Izzatusholekha (2022) JURNAL JIMEK Vol 2 No. 1 Jurnal	Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> di PT Pertamina (Persero)	Bagaimana implementasi dari CSR PT. Pertamina (Persero)	Proses pengimplementasian yang dilakukan dengan program yang diambil dari hasil keputusan rapat kerja dan pengajuan program dari luar perusahaan, lalu beberapa proses selanjutnya sampai eksekusi program dan laporan pelaksanaan. Terdapat 4 pilar yang menjadi program utama yaitu, program Pertamina Sehati, Pertamina Cerdas, Pertamina Berdikari hingga Pertamina Hijau

Research Gap

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan referensi penulis seluruhnya merupakan penelitian yang dilakukan di sub holding anak perusahaan PT. Pertamina (Persero). Secara keseluruhan penerapan program *community development* dilakukan dengan kegiatan yang mendorong pada aspek lingkungan seperti penelitian Fatimatuzzahroh (2021) di mana program *community development* yang dilakukan berupa Rehabilitasi dan Ekowisata Mangrove dan penelitian Zakky (2020) yang juga kegiatannya mengarah pada lingkungan yaitu Program Bank Sampah. Beberapa penelitian di atas juga menunjukkan bahwa fokus kajian hanya terbatas pada mendeskripsikan bagaimana proses kegiatan atau implementasi *community development*. Seperti pada penelitian Pratiwi (2022) yang menjelaskan secara garis besar konsep kegiatan yang dilakukan PT. Pertamina (Persero), Prihatini (2010) untuk implementasi, dan Ridwanullah (2009) implementasi yang kemudian diambil kesimpulan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi *community development*.

Berdasarkan peparan tersebut, belum ada penelitian yang berfokus pada proses kegiatan *community development* yang mana programnya bertujuan untuk fokus mendorong aspek sosial ekonomi khususnya meningkatkan kewirausahaan. Disamping hal tersebut, pada penelitian ini penulis bukan hanya menyajikan bagaimana proses implementasi dari *community development*, tetapi juga menganalisa bagaimana dampak yang dihasilkan menggunakan analisa *compass sustainability*. Penelitian ini akan melengkapi hasil dari penelitian Eko Widodo (2019) menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat dan *compass sustainability*, di mana fokus evaluasi pada penelitian ini dilakukan pada program *community development* berupa inkubator bisnis.

1.5.6 Definisi Konseptual dan Operasional

1.5.6.1 Definisi Konseptual

1. *Community development* menurut Matarrita-Cascante & Brennan (2012)

Community Development proses yang memerlukan pengorganisasian, fasilitasi, dan tindakan, yang memungkinkan orang menetapkan cara untuk menciptakan komunitas yang mereka inginkan

2. Pendampingan Bisnis menurut Suharto (2014)

Pendampingan merupakan interaksi antara pendamping dengan kelompok atau masyarakat penerima manfaat yang dilaksanakan secara intens dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat.

1.5.7 Definisi Operasional

1. *Community development* menurut Hasim dan Remiswal (2009)

- 1) Partisipasi dalam upaya memperbaiki taraf hidup
- 2) Bantuan dan pelayanan teknis untuk mengembangkan prakarsa dan tekad

2. Pendampingan Bisnis, menurut Suharto (2014)

- 1) Pemungkinan (*enabling*) atau fasilitas
- 2) Penguatan (*empowering*)
- 3) Perlindungan (*protecting*)
- 4) Pendukungan (*supporting*)

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Desain Penelitian

Penelitian ini mempergunakan tipe penelitian *mix method* dengan evaluasi program. Hasil evaluasi akan dijelaskan secara deskriptif menggunakan narasi maupun bagan. Secara umum tujuan dari penelitian evaluatif adalah guna melakukan perancangan, penyempurnaan, dan pengujian program. Selain itu, penelitian evaluatif juga ditujukan guna memberikan penilaian

terhadap keberhasilan program secara spesifik dan menilai manfaat dari kegiatan tersebut. Peneliti juga menggunakan pendekatan tindakan partisipatif (*Participatory action research*) dalam memperoleh data guna mengetahui dan memahami secara langsung bagaimana pelaksanaan program yang mana dalam hal ini yaitu program *community development* melalui pendampingan bisnis.

Tahap-tahap evaluasi program dengan pendekatan kualitatif secara garis besar adalah

Gambar 1.5 Alur Tahapan Evaluasi Program dengan Pendekatan Kualitatif



Sumber Royse, at all., (2006)

1. Menentukan Fokus Evaluasi

Pada penelitian ini, fokus evaluasi mengarah pada bagaimana proses dari pendampingan bisnis pada Dapur Pertaharjo. Proses pendampingan bisnis jika dijabarkan maka terkait bagaimana fasilitas yang diberikan selama pendampingan, penguatan terhadap kelompok yang didampingi, perlindungan terhadap kegiatan usaha dan pendampingan, serta supporting atau pendukung baik dari pelatihan materi mau pun pendukung motivasi

2. Menentukan Unit Analisis

Unit yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah Dapur Pertaharjo yang terletak di Jalan Tambakharjo, RT 03 RW 01, Kelurahan Tambakharjo, Semarang Barat, Kota Semarang.

3. Menjajagi Aksesibilitas

Dalam penelitian ini, perlu adanya akses untuk dapat memperoleh informasi dari narasumber. Akses tersebut dapat didapat dengan mengajukan izin penelitian kepada PT Pertamina DPPU Ahmad Yani selaku penanggung jawab dari program inkubator bisnis Dapur Pertaharjo. Selain itu, perlu juga untuk adanya izin dari PT Undip Maju yang merupakan mitra dari PT Pertamina DPPU Ahmad Yani dalam mengelola *community development* Dapur Pertaharjo.

4. Menentukan Cara Mengumpulkan Data

Dalam penelitian ini, informasi diperoleh dari berbagai narasumber melalui wawancara terbuka dan kuesioner penilaian kepuasan. Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber seperti anggota Dapur pertaharjo, anggota tim inkubator bisnis, community development officer PT Pertamina DPPU Ahmad Yani, PT Undip Maju, serta pihak pemerintah setempat dari lokasi Dapur Pertaharjo. Pemilihan narasumber juga didasarkan pada snowball sampling yang mana jumlah dari narasumber akan terus bertambah seiring informasi yang semakin banyak untuk diperoleh.

5. Menentukan Cara Menganalisa Data

Analisa data pada penelitian ini digunakan dengan reduksi data dari hasil wawancara. Dimana transkrip dari wawancara oleh berbagai narasumber akan diperhalus untuk penggunaan kata dan disusun kembali sesuai inti dari jawaban wawancara agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Setelah adanya reduksi data, maka hasil penelitian akan disajikan menggunakan deskripsi, tabel, dan grafik sesuai hasil wawancara dan dianalisis dengan teori yang telah dijelaskan pada landasan teori. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah disepakati diawal oleh penulis.

6. Menampilkan Data dalam Bentuk Narasi

Hasil dari wawancara akan disajikan dalam bentuk narasi agar lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Pada saat menyajikan data, penulis akan menganalisa hasil evaluasi pendampingan bisnis dengan kajian pada landasan teori. Setelah itu penulis akan memberikan rekomendasi dengan bantuan metode *compass sustainability*. Selain dalam bentuk narasi, penulis akan menambahkan visual berupa grafik mau pun tabel agar hasil wawancara atau data yang diperoleh lebih mudah dipahami oleh pembaca.

7. Kesimpulan dalam Bentuk Deskripsi

Diakhir penelitian, penulis akan memberikan kesimpulan dalam bentuk deskripsi. Kesimpulan dituliskan dengan deskripsi agar lebih leluasa dalam memberikan narasi dari hasil data yang diperoleh. Kesimpulan tersebut dibuat berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu bagaimana proses pendampingan bisnis Dapur Pertaharjo, Faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan, dan apa saja dampak ekonomi dan sosial yang diperoleh.

1.6.1 Situs Penelitian

Situs pada penelitian ini yaitu usaha Dapur Pertaharjo yang terletak di Jalan Tambakharjo, RT 03 RW 01, Kelurahan Tambakharjo, Semarang Barat, Kota Semarang

1.6.2 Subjek Penelitian

Pemilihan kriteria informan penelitian dari stakeholder dalam penelitian ini yaitu dipilih sesuai dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Ketua Pengelola Dapur Pertaharjo, dalam kriteria ini yaitu Ibu Nafiq selaku ketua pengelola Dapur Pertaharjo. Kriteria ini dipilih sebagai informan pertama dikarenakan merasakan seluruh rangkaian pendampingan bisnis yang diberikan dari awal hingga akhir. Ketua pengelola Dapur Pertaharjo juga melakukan koordinasi baik dengan tim inkubator mau pun pihak CDO Pertamina DPPU Ahmad Yani

2. Tim Inkubator Bisnis Dapur Pertaharjo, kriteria ini dipilih dikarenakan Tim Inkubator memberikan pendampingan dan fasilitator langsung kepada Dapur Pertaharjo. Tim Inkubator juga bertanggung jawab dalam perencanaan hingga eksekusi dari pendampingan bisnis yang dilakukan.
3. *Community Development Officer* PT Pertamina DPPU Ahmad Yani, kriteria ini dipilih dikarenakan CDO PT Pertamina DPPU Ahmad Yani bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *community development* yang mana dilakukan dalam bentuk inkubator bisnis.
4. *Staff Kelurahan Tambakrejo*, kriteria ini dipilih dikarenakan dari sektor pemerintahan, pihak kelurahan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan *community development* serta menjadi penanggung jawab atas diberikannya manfaat dari program *community development*.
5. Perwakilan PT Undip Maju, kriteria ini dipilih dikarenakan PT Undip Maju masuk dalam sektor akademisi yang menjadi perantara antara Tim Inkubator Bisnis dengan CSR PT Pertamina DPPU Ahmad Yani. PT Undip Maju juga turut serta dalam memberikan masukan dari segi keilmuan untuk program *community development* ketika agenda monitoring dan evaluasi

Setelah kelima informan utama pada penelitian ini, tidak memungkiri akan dilakukan pula *snawball sampling* dalam pemilihan informan. *Snawball sampling* digunakan tergantung pada situasi dilapangan apabila membutuhkan informan tambahan untuk mendapat informasi seluas mungkin

1.6.3 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu kata-kata dan tindakan, dan sumber data tertulis. Kedua jenis tersebut diperoleh peneliti melalui wawancara dan studi pustaka.

1. Kata kata dan tindakan

Data berupa kata-kata dan tindakan dapat diperoleh dari wawancara dan studi pustaka. Penulis akan menuliskan dalam catatan kecil berupa jawaban dari pertanyaan ketika wawancara kemudian diolah dan ditulis ulang untuk menjadikan sebuah informasi yang dapat dipahami oleh pembaca.

2. Sumber data tertulis

Sumber data tertulis merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis seperti buku dan artikel ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi serta dokumen resmi. Dalam penelitian ini, penulis lebih banyak mengambil sumber data tertulis dari berbagai jurnal terkait *community development*, *corporate social responsibility*, dan pendampingan bisnis. Penulis juga menggunakan beberapa catatan evaluasi pelaksanaan kegiatan program pendampingan bisnis Dapur Pertaharjo.

1.6.4 Sumber Data

Menurut Arikunto (1998) sumber data merupakan subjek yang menjadi sumber data penelitian. Moleong (2001) menjelaskan bahwa pencatatan sumber data melalui wawancara atau observasi adalah hasil penggabungan dari melihat, mendengar, dan bertanya. Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian antara lain sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer adalah adalah data yang didasarkan informasi yang didapat dari tangan pertama oleh peneliti yang berkorelasi dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari

1) Kuesioner

Kuesioner diberikan kepada masyarakat penerima manfaat (*benefit series*) dari kegiatan *community development* PT Pertamina DPPU Ahmad Yani yaitu sebanyak 15 orang dari keseluruhan anggota pengelola Dapur Pertaharjo

2) Wawancara terstruktur dan terbuka

Wawancara terstruktur dan terbuka dilakukan kepada *stakeholder* yaitu tim inkubator bisnis Dapur Pertaharjo, CDO PT Pertamina DPPU Ahmad Yani, PT Undip Maju, dan Staff Kelurahan. Untuk jumlah disesuaikan dengan anggota yang turut serta dalam proses pendampingan bisnis, namun tidak menutup kemungkinan jumlah akan bertambah seiring banyaknya informasi yang hendak diperoleh.

Tabel 1.I.2 Jumlah dan Jenis Narasumber Responden

Tipe Data	Responden				
	Anggota Dapur Pertaharjo	Tim Inkubator Bisnis	CDO PT Pertamina DPPU Ahmad Yani	PT Undip Maju	Staff Kelurahan
Kuesioner	15 orang	0	0	0	0
Wawancara	0	4 orang	2 orang	2 orang	2 orang

Sumber Olah Data Penulis, 2021

Metode kuesioner dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi di lapangan, perasaan, motivasi, dan dampak yang dirasakan penerima manfaat dari *community development* PT Pertamina DPPU Ahmad Yani. Kuisisioner dilakukan dengan pertanyaan tertutup. Untuk pelaksanaan wawancara kepada *stakeholder*, dilakukan untuk mengetahui bagaimana rencana awal kegiatan *community development* dirancang, pelaksanaan dilapangan sebagai penyedia, dan evaluasi dari segi pelaksana program.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari hasil informasi yang telah dikelola oleh pihak lain. Data sekunder pada penelitian ini mengacu pada berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik dan pembahasan. Penulis juga menggunakan bukti data sekunder dari laporan tertulis kegiatan pendampingan bisnis.

Data sekunder pada penelitian ini dapat diperoleh dari Kelurahan setempat yaitu Kelurahan Tambakharjo untuk mengetahui kondisi lapangan tempat pelaksanaan community development. Data lain sebagai pendukung juga dapat diperoleh dari PT Pertamina DPPU Ahmad Yani dan PT Undip Maju sebagai perencana program.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data ialah beberapa cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data umumnya menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara (Subadi, 2006). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1.7.6.1 Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengambilan data dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber dengan pertanyaan yang sesuai dengan tujuan serta rumusan masalah penelitian. Wawancara dalam pengambilan data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan wawancara pertanyaan terbuka. Arikunto (2013) memberi pengertian bahwa wawancara bebas terpimpin merupakan wawancara yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan bebas namun tetap berkaitan dengan permasalahan atau pun topik yang diteliti.

1.7.6.2 Metode kepustakaan

Metode kepustakaan adalah teknik untuk memperoleh data yang berfokus pada teori-teori untuk mendukung penelitian melalui berbagai buku referensi jurnal dan dokumen pendukung.

1.7.6.2 Observasi

Sugiyono (2005) menjelaskan bahwa observasi adalah proses pengambilan data yang cukup rumit karena yang melibatkan aspek biologis dan psikologis. Observasi dilakukan bukan hanya sebatas berkomunikasi dengan responden, melainkan juga dilakukan dengan mengamati obyek yang terdapat disekitar responden mau pun tempat penelitian. Teknik observasi yang dilakukan peneliti adalah *Marginal Participant*. Menurut Hadi (2019) dalam melakukan pengamatan *marginal participant*, penulis terjun langsung ke lokasi penelitian, mengikuti kegiatan, dan dikenal identitasnya. Tipe pengamatan ini bertujuan untuk menyaksikan langsung dinamika konflik dan perubahan serta kelompok sosial berkembang dalam prosesnya.

1.6.6 Analisis dan Interpretasi Data

Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2005) mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif, supaya data yang didapat penuh, maka dalam aktivitasnya perlu dilakukan secara berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dan interaktif

Untuk mempermudah menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan beberapa analisa data untuk mendukung penelitian ini. Terdapat 3 kegiatan analisis yang dipakai pada kajian ini , yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data mempunyai arti sebagai proses pemilihan kata untuk menyederhanakan mengabstrakkan, serta mentransformasi data “kasar” yang timbul dari beberapa catatan tertulis di lapangan (Sugiyono, 2015). Reduksi dalam pengumpulan data meliputi kegiatan menulis hasil penelitian secara rinci dan jelas serta membuat poin-poin penting hasil pengamatan di lapangan. Untuk memperoleh kesimpulan akhir, reduksi data sangat diperlukan untuk meminimalisir maupun menajamkan data yang diperoleh saat pengumpulan data.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dilaksanakan pasca penulis melakukan reduksi data atau penyederhanaan pada tahap sebelumnya. Tujuan dari adanya tahap penyajian data adalah agar data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan mudah dibaca dan dipahami.

Data primer yang didapatkan dari hasil pembagian kuesioner kepada masyarakat, dan *stakeholders*, diolah melalui teknik analisis kuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi sederhana yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan narasi guna memberikan interpretasi. Data sekunder yang didapatkan dari Kelurahan Tambakharjo, PT Pertamina DPPU Ahmad Yani, dan PT Undip Maju disusun dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Data selanjutnya dievaluasi secara analitis deskriptif berdasarkan kajian landasan teori melalui pendekatan *Compass Sustainability*

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*)

Tahap terakhir dalam teori miles adalah tahap penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis masih dapat berubah apabila ditemukan hal-hal lain dalam pengambilan data. Dalam proses keberjalanan penarikan kesimpulan harus dilakukan verifikasi secara menyeluruh baik proses pengambilan data maupun data tersebut. Oleh karena itu, diakhir akan memunculkan kesimpulan yang valid dan dapat diuji kebenarannya serta dipertanggung jawabkan. Pada penelitian kualitatif memungkinkan rumusan masalah yang ditetapkan diawal dapat dijawab oleh kesimpulan, namun mungkin saja sebaliknya mengingat rumusan masalah bersifat sementara.

1.6.7 Kualitas Data

Pada penelitian kualitatif, kualitas data dapat didapat dengan melangsungkan uji keabsahan data guna untuk menghindari kesalahan. Adanya pengujian keabsahan data juga digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang valid. Sebuah data dari penelitian kualitatif dapat dikategorikan valid jika tidak ditemukan perbedaan antara yang terjadi dilapangan dengan

apa yang dituliskan dalam sebuah penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan berbagai uji, antara lain:

1.6.7.1 Uji Kredibilitas

Menurut Sugiyono (2010) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilaksanakan melalui:

1. Triangulasi

William Wirsena dalam Sugiyono (2010) mengatakan bahwa teknik triangulasi guna melangsungkan pengujian kredibilitas penelitian adalah teknik dengan cara mengecek data yang didapatkan dari beragam sumber dengan waktu dan situasi yang berbeda. Menurut Sugiyono (2010) jenis triangulasi terbagi menjadi 3 cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilaksanakan melalui pengecekan hasil data yang diperoleh dari beberapa sumber guna menguji kredibilitas data. Kesimpulan hasil dari analisis data yang dilakukan peneliti kemudian dilakukan chross check dan perbandingan dari sumber data lainnya.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilaksanakan melalui pengecekan kebenaran data dari berbagai sumber yang sama namun dengan teknik pengambilan yang berbeda. Triangulasi teknik bertujuan untuk menguji konsistensi dari hasil data yang diperoleh. Bila ditemukan hasil yang berbeda, maka peneliti dapat melakukan diskusi dengan sumber data untuk menentukan kepastian dan kesepakatan.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilaksanakan melalui pengambilan data dengan berbagai teknik namun dalam kurun waktu ataupun keadaan yang berbeda. Triangulasi waktu bertujuan untuk mengetahui konsistensi data mengingat waktu sering mempengaruhi keabsahan data.

1.6.7.2. Uji Transferabilitas

Uji Transferabilitas adalah uji untuk mengetahui sejauh mana hasil penelitian dapat dipahami atau bahkan diterapkan dalam kasus atau penelitian lain. Untuk mencapai hal tersebut maka peneliti harus menjelaskan hasil penelitiannya dengan rinci dan jelas sehingga mudah untuk dipahami.

Jika setelah membaca hasil penelitian mampu mengambil keputusan untuk menggunakan atau tidak dalam penelitian mereka dengan berbagai alasan, maka dapat dikatakan penelitian tersebut sudah memenuhi standart transferabilitas karena diibaratkan ilmu sudah dipahami oleh pembaca.

1.6.7.3 Uji Dependabilitas

Uji Dependabilitas dapat disebut pula uji reliabilitas. Apabila hasil dari penelitian atau proses penelitian dapat diulangi atau direplikasi oleh orang lain, maka penelitian dianggap reliabel. Reliabilitas juga berhubungan dengan stabilitas data, dimana apabila terdapat dua atau lebih peneliti yang melakukan penelitian dengan objek yang sama maka akan menghasilkan hasil yang sama pula.

Uji Dependabilitas dilaksanakan dengan cara melangsungkan pengujian untuk seluruh proses penelitian. Pengujian atau pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh dosen pembimbing untuk menguji kebenaran seluruh aktivitas atau proses penelitian mulai dari peneliti menentukan masalah atau fokus sampai dengan membuat kesimpulan yang ditunjukkan oleh peneliti.

1.6.7.4 Uji Konfirmabilitas

Uji Konfirmabilitas adalah pengujian hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Uji Konfirmabilitas biasa dilakukan bersamaan dengan uji dependabilitas karena proses uji yang hampir serupa. Hasil dari penelitian akan diuji apakah sudah selaras dengan fungsi dan proses penelitian yang telah dilakukan, apabila sesuai maka hasil penelitian dianggap lolos dalam tahap uji konfirmabilitas.